



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 7 Juni 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai Bulan Mei 2023; 2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022; 3. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024; 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai Bulan Mei 2023, Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022, Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024, dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 4 Juni 2023 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian PUPR	22,70%	24,95%

3. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang Pagu Indikatif TA 2024 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 tanggal 10 April 2023, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	PAGU INDIKATIF TA 2024	SELISIH/ BACKLOG
	A	B	A - B
Kementerian PUPR	190.743.036.298	128.155.744.266	62.587.292.032

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2024 di DPR RI.

4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 7 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,



RIDWAN BAE